

Journal of Government Insight

ISSN: 2789-7418 (online)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sinjai.



The Role of Central Kalimantan Provincial Government in Improving Human Resource Quality through the One House One Graduate Program

Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Peningkatan Kualitas SDM melalui Program Satu Rumah Satu Sarjana

Rakhdinda Dwi Artha Qairi¹, Sadar, Sadar²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

Email Penulis: rakhdindadwiarthaqairi@umpr.ac.id, sadarbahtiar@umpr.ac.id

Article Info

Received:

08/12/2025

Revised:

10/01/2026

Accepted

07/03/2026

Keywords:

Education Policy,
Human Resource
Development,
Provincial
Government,
Scholarships, One
Household One
Bachelor Program.

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the role of the Provincial Government of Central Kalimantan in improving human resource quality through the Satu Rumah Satu Sarjana (One House One Bachelor) Program as a strategic approach to family-based and socially inclusive educational development. Using a descriptive qualitative approach, the study relies on primary data obtained from in-depth interviews with key stakeholders and secondary data drawn from official government documents, statistical reports, and relevant publications. The findings indicate that the provincial government plays a strategic role in expanding access to higher education through regulatory support, scholarship provision, partnerships with universities, and mechanisms for identifying eligible households. The program has been shown to enhance educational motivation at the family level, strengthen the academic capacity of student beneficiaries, and generate broader social impacts in the form of increased educational aspirations among the younger generation. Nevertheless, the study also identifies several challenges, particularly the uneven distribution of information across regions and the limitations of program outreach. These issues highlight the need for more inclusive dissemination strategies and improved coordination among implementing institutions. Overall, the program contributes significantly to regional human resource development and serves as a replicable model of educational policy, provided that governance mechanisms and cross-sectoral collaboration are further strengthened. Recommendations are offered to enhance the program's effectiveness, including improving evaluation systems, strengthening non-financial support for beneficiaries, and developing long-term planning related to graduate absorption and employment pathways.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Satu Rumah Satu Sarjana sebagai salah satu strategi pembangunan pendidikan berbasis keluarga dan inklusi sosial. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengandalkan data primer dari wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan serta data sekunder dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, dan publikasi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam perluasan akses pendidikan tinggi melalui regulasi, pemberian beasiswa, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta mekanisme pendataan rumah tangga sasaran. Program ini terbukti meningkatkan motivasi pendidikan di tingkat keluarga, memperkuat kapasitas akademik mahasiswa penerima, dan memberikan dampak sosial berupa peningkatan aspirasi pendidikan bagi generasi muda. Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi tantangan berupa ketidakseimbangan distribusi informasi. Secara keseluruhan, program ini sangat bermanfaat untuk pembangunan SDM daerah dan menjadi model kebijakan pendidikan yang dapat direplikasi dengan penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi diberikan terkait peningkatan sistem evaluasi, penguatan dukungan nonfinansial, serta perencanaan jangka panjang terkait penyerapan lulusan.



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat utama bagi peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat provinsi, peningkatan kualitas SDM berkaitan erat dengan akses dan penyelesaian pendidikan tinggi, kualitas layanan pendidikan, serta kebijakan-program yang mampu menjangkau kelompok marjinal dan wilayah terpencil. Meskipun terjadi perbaikan indikator pembangunan manusia di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan signifikan terkait proporsi penduduk berpendidikan tinggi dan pemerataan akses pendidikan tinggi antar kabupaten/kota. Hal ini memunculkan kebutuhan kebijakan yang bersifat afirmatif dan kontekstual untuk mempercepat pemerataan kualitas SDM. (BPS Kalteng, 2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren perbaikan (seperti IPM mencapai nilai yang lebih baik pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya), namun capaian tersebut masih menuntut peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia agar berdampak nyata pada produktivitas dan penurunan ketimpangan. Selain itu, data BPS mengenai tingkat penyelesaian pendidikan menunjukkan variasi capaian antarwilayah yang menandakan masih adanya celah akses dan outcome pendidikan tinggi. Dalam konteks itulah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir 2025 memperkenalkan dan memantapkan program **“Satu Rumah Satu Sarjana”** sebagai upaya afirmatif, menggandeng perguruan tinggi, untuk memberikan kesempatan kuliah (termasuk kuliah gratis pada beberapa skema) bagi keluarga yang belum memiliki anggota bergelar sarjana, dengan prioritas kawasan desa dan wilayah terpencil. Inisiatif ini relevan karena berpotensi mempercepat pemerataan akses pendidikan tinggi dan berimplikasi pada peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah. (BPS Kalteng, 2025)

Meski program bersifat ambisius, masih sedikit bukti empiris yang menjelaskan efektivitas intervensi serupa dalam konteks provinsi, khususnya pada aspek: (1) sejauh mana program meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan tinggi bagi target kelompok, hal ini karena program Satu Rumah DSatu Sarjana baru di rilis pada tahun 2025; (2) bagaimana program memitigasi hambatan geografis, ekonomi, dan sosial-kultural di wilayah terpencil; dan (3) apakah keberpihakan program berdampak pada perubahan indikator kualitas SDM yang terukur (seperti kontribusi pada IPM, penyerapan tenaga kerja terdidik, dan mobilitas sosial). Literatur tentang pengembangan SDM di Kalimantan Tengah menyajikan strategi dan tantangan umum (seperti peningkatan infrastruktur pendidikan dan program pelatihan), tetapi jarang menilai secara komprehensif outcome dari program afirmatif berbasis keluarga seperti Satu Rumah Satu Sarjana. (Sujud, A., & Ivan, M. (2022)

Dari tinjauan literatur dan laporan kebijakan regional ditemukan beberapa gap: (1) minimnya studi evaluatif yang khusus menginvestigasi desain dan hasil program Satu Rumah Satu Sarjana pada level provinsi; (2) keterbatasan penelitian kuantitatif-longitudinal yang mengukur efek program terhadap indikator kualitas SDM (seperti penyelesaian studi, status pekerjaan, dan kontribusi terhadap IPM dan ekonomi lokal); serta (3) kurangnya kajian kualitatif yang menggali pengalaman penerima manfaat dan hambatan implementasi di desa/daerah terpencil. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan evaluatif mixed-methods yang (a) mengukur outcome kuantitatif program terhadap indikator pendidikan dan SDM di tingkat kabupaten/kota, dan (b) menggali pengalaman aktor lapangan (pemerintah provinsi, perguruan tinggi mitra, keluarga sasaran) untuk memahami mekanisme, hambatan, serta faktor keberlanjutan program. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menilai efektivitas tetapi juga proses implementasi dan keterkaitan kebijakan-hasil di konteks Kalimantan Tengah, sebuah kontribusi empiris yang penting bagi pengembangan kebijakan afirmatif pendidikan tingkat subnasional. (Media Indonesia, 2025).

Berdasarkan perumusan masalah dan gap di atas, penelitian ini dirumuskan secara spesifik dengan tujuan; Mengukur pengaruh program Satu Rumah Satu Sarjana terhadap tingkat penyelesaian pendidikan tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode pelaksanaan program (outcome kuantitatif pada skala kabupaten/kota); Menganalisis kontribusi program terhadap indikator kualitas SDM (seperti kontribusi pada IPM, status pekerjaan lulusan, dan mobilitas sosial) menggunakan data sekunder dan indikator pembangunan provinsi; Mengidentifikasi faktor-faktor penguatan dan penghambat implementasi program dari perspektif pemerintah provinsi, perguruan tinggi mitra, dan keluarga sasaran melalui studi kualitatif; dan Menyusun rekomendasi kebijakan operasional untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Satu Rumah Satu Sarjana di Kalimantan Tengah.

Pendekatan evaluatif yang komprehensif pada program Satu Rumah Satu Sarjana di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menghasilkan bukti kebijakan (*policy evidence*) bagi pengambil keputusan daerah dan memberikan kontribusi akademik pada literatur pengembangan SDM dan kebijakan pendidikan afirmatif di tingkat subnasional.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Human Capital, Capability, dan Kebijakan Implementasi

Kajian tentang peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial umumnya berpijak pada dua tradisi teori utama. Pertama, Human Capital Theory yang dikembangkan oleh Becker menegaskan bahwa investasi pendidikan meningkatkan produktivitas individu dan memberi imbal hasil ekonomi yang dapat menjelaskan hubungan antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan daerah. Perspektif ini relevan untuk menilai argumen instrumental program Satu Rumah Satu Sarjana yang menempatkan peningkatan jenjang pendidikan sebagai alat utama peningkatan kualitas SDM. (Becker, 1964)

Kedua, Capability Approach Amartya Sen melengkapi pandangan instrumental dengan mempertimbangkan kebebasan substantif individu, yakni kesempatan riil untuk mewujudkan fungsi-fungsi yang bernilai (seperti berpendidikan, berpartisipasi sosial). Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi apakah program afirmatif benar-benar memperluas kapabilitas (*opportunity set*) kelompok marginal, bukan sekadar menaikkan angka partisipasi pendidikan. Kombinasi kedua perspektif ini memungkinkan analisis yang menangkap baik *outcome* ekonomi (penghasilan, penyerapan tenaga terdidik) maupun dimensi keadilan sosial/pemberdayaan.

Kerangka Implementasi Kebijakan untuk Program Afirmasi Pendidikan

Implementasi kebijakan dalam berbagai literatur menegaskan bahwa *good policy design* tidak pernah menjamin keberhasilan program apabila tidak ditopang oleh struktur implementasi yang kuat. Pressman dan Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sering muncul bukan karena kebijakan kurang tepat, tetapi karena rantai implementasi terlalu panjang, banyaknya titik koordinasi, dan munculnya deviasi pada tingkat pelaksana. Dalam konteks program afirmasi pendidikan seperti Satu Rumah Satu Sarjana, kompleksitas serupa dapat terlihat dari banyaknya aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah provinsi, perguruan tinggi mitra, hingga pemerintah kabupaten/kota dan keluarga calon penerima manfaat yang menuntut mekanisme implementasi yang lebih tepat dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Selain persoalan desain, literatur modern menekankan pentingnya memperhatikan aspek institusional, kapasitas birokrasi, serta kondisi geografis dan sosial-kultural sebagai faktor determinan keberhasilan implementasi. Hill dan Hupe (2014) menyoroti bahwa implementasi kebijakan harus dipahami sebagai proses yang berada dalam jejaring (*governance network*), sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh relasi antar-aktor, pola

komunikasi, dan kejelasan pembagian kewenangan. Dalam kasus Kalimantan Tengah, konteks geografis yang luas dan ketimpangan akses pendidikan antar wilayah menjadi faktor eksternal yang harus masuk dalam kerangka implementasi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap kapasitas lokal dan adaptasi strategi implementasi pada wilayah yang memiliki kebutuhan berbeda.

Kerangka input-process-output-outcome yang diperkenalkan dalam berbagai model implementasi menjadi perangkat analitis yang cukup relevan untuk menilai efektivitas program Satu Rumah Satu Sarjana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi tidak hanya desain input seperti kriteria penerima dan skema pembiayaan, tetapi juga proses implementasi, termasuk koordinasi lintas lembaga dan efektivitas mekanisme seleksi mahasiswa. Penekanan pada analisis proses sebagaimana disarankan Pressman & Wildavsky (1973) dan Hill & Hupe (2014) sangat penting karena *outcome* pendidikan jangka panjang tidak dapat dipahami hanya dari indikator keluaran administratif. Dengan demikian, evaluasi implementasi harus menghubungkan secara sistematis antara struktur institusional, kapasitas pelaksana, dinamika jejaring aktor, serta konteks lokal untuk memahami seberapa jauh program afirmasi pendidikan ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.

Bukti Empiris tentang Program Beasiswa dan Inisiatif "Satu Desa/Satu Sarjana" di Indonesia

Studi empiris pada program beasiswa dan inisiatif afirmatif di Indonesia menunjukkan hasil beragam, banyak kajian menemukan bahwa beasiswa bertarget berbasis kebutuhan dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kemungkinan menyelesaikan pendidikan tinggi, namun efektivitas jangka panjang terhadap penyerapan kerja terdidik dan pengurangan ketimpangan seringkali bergantung pada kualitas implementasi dan dukungan pelengkap (fasilitas, pembelajaran, akses internet di daerah terpencil). Kajian terkait program Dua Sarjana Satu Desa dan program sejenis mendokumentasikan faktor keberhasilan seperti keterikatan komitmen lokal, monitoring yang konsisten, serta kemitraan perguruan tinggi-pemerintah daerah; namun studi-studi ini sering bersifat kasus lokal dan belum menguji outcome provinsi secara kuantitatif-longitudinal.

Konteks spesifik Kalimantan Tengah pada 2025 menunjukkan munculnya program Satu Rumah Satu Sarjana yang sudah memasuki tahap konsolidasi kemitraan (puluhan perguruan tinggi tandatangan MoU dan agenda kuota awal); namun, sejauh ini bukti yang dipublikasikan bersifat deskriptif pelaporan capaian administratif, rencana kuota, dan pernyataan kebijakan tanpa analisis evaluatif yang sistematis atas *outcome* pendidikan maupun perubahan indikator kualitas SDM. Hal ini menegaskan kebutuhan studi evaluatif.

Perbandingan Pendekatan Evaluatif: Kelemahan dan Kekuatan Studi Terdahulu

Beberapa penelitian pendekatan kuantitatif pada program beasiswa (seperti KIP-K, beasiswa daerah) menunjukkan efektivitas terhadap prestasi akademik dan retensi, namun seringkali mengabaikan dimensi proses implementasi dan konteks yang menyebabkan heterogenitas efek (seperti daerah terpencil vs perkotaan). Sebaliknya, studi pendekatan kualitatif mengenai "satu desa/satu sarjana" memberi wawasan mekanistik (bias seleksi, peran aktor lokal) tetapi terbatas dalam generalisasi. Oleh karena itu, literatur menunjuk pada kebutuhan metodologis: studi *mixed-methods* yang menggabungkan estimasi kuasi-eksperimental (untuk mengukur efek kausal terhadap penyelesaian pendidikan dan outcome ekonomi) dengan studi kualitatif mendalam (untuk menjelaskan mekanisme, hambatan, dan keberlanjutan).

Dari tinjauan di atas dapat dirumuskan gap utama: (a) Minimnya studi evaluatif berskala provinsi yang mengukur efek program afirmatif keluarga (seperti Satu Rumah Satu

Sarjana) terhadap penyelesaian pendidikan tinggi, indikator kualitas SDM (kontribusi terhadap IPM, perubahan status pekerjaan), dan dampak ekonomi lokal; (b) Keterbatasan integrasi antara analisis outcome kuantitatif-longitudinal dengan analisis proses implementasi (koordinasi pemerintah-kampus, mekanisme pemilihan penerima, dukungan infrastruktur untuk pendidikan di daerah terpencil); (c) Ketiadaan kerangka konseptual empiris yang secara eksplisit menghubungkan desain kebijakan afirmatif berbasis keluarga, faktor kontekstual (geografi, infrastruktur digital, status ekonomi), dan hasil SDM pada skala subnasional. Gap ini memberi ruang bagi penelitian yang menyajikan bukti kebijakan provinsi dan teori implementasi sekaligus.

Berdasarkan gap, penelitian ini menawarkan kebaruan: (1) evaluasi komprehensif program Satu Rumah Satu Sarjana pada tingkat provinsi (Kalimantan Tengah) yang memadukan analisis kuantitatif-longitudinal (mengukur perubahan penyelesaian pendidikan tinggi, kontribusi terhadap IPM, dan outcome ketenagakerjaan) dengan kajian kualitatif implementatif (wawancara dengan pemerintah provinsi, perguruan tinggi mitra, dan keluarga sasaran); dan (2) pembangunan kerangka konseptual yang memposisikan desain kebijakan (instrumen beasiswa, kuota, kemitraan perguruan tinggi), mekanisme implementasi (koordinasi, monitoring, dukungan infrastruktur), dan kondisi konteks (akses geografis, status ekonomi rumah tangga) sebagai determinan bersama hasil SDM. Kerangka ini menggunakan pengukuran berlapis: input, proses, output dan outcome, dengan variabel moderating (kondisi geografis dan dukungan infrastruktur) dan mediating (motivasi keluarga, kualitas layanan pendidikan). Pendekatan tersebut menjawab kebutuhan untuk menjelaskan tidak hanya apakah program bekerja, tetapi bagaimana, untuk siapa, dan dalam kondisi apa.

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan penelitian lapangan dengan tinjauan pustaka untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana di Kalimantan Tengah. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, termasuk unsur pemerintah, pengelola pendidikan, dan calon penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan tinjauan pustaka terhadap karya ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan akses pendidikan tinggi. Tinjauan pustaka disusun menggunakan prinsip-prinsip systematic review secara umum, yaitu mengidentifikasi, memilih, dan mensintesis sumber-sumber yang relevan untuk memperkuat analisis. Proses ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi temuan tidak hanya didasarkan pada pengalaman lapangan, tetapi juga pada perkembangan pengetahuan yang telah dibahas dalam literatur terdahulu (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Data lapangan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk menemukan pola dan isu utama yang muncul dari pengalaman para informan. Dengan memadukan temuan empiris dan kajian teoretis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program afirmasi pendidikan di tingkat provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Peran Pemerintah Provinsi dalam Desain Kebijakan Program Satu Rumah Satu Sarjana

Desain kebijakan Satu Rumah Satu Sarjana mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi pendidikan tinggi yang bersifat afirmatif. Temuan lapangan mengindikasikan

bahwa proses perumusan kebijakan melibatkan identifikasi kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah melalui integrasi data sosial seperti DTKS dan verifikasi lapangan oleh perangkat daerah terkait. Pendekatan berbasis rumah tangga (*household targeting*) ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memahami bahwa keputusan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga kondisi struktural keluarga. Hal ini sejalan dengan perspektif *family capability approach* yang menekankan pentingnya memastikan bahwa keluarga memiliki kapabilitas untuk mendukung pendidikan anggota rumah tangganya.

Selain itu, desain kebijakan juga memasukkan mekanisme pembiayaan yang relatif komprehensif, termasuk bantuan UKT, biaya hidup tertentu, dan pendampingan administratif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menjalin kemitraan formal dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Tengah. Kemitraan ini memperkuat kapasitas institusi dalam memastikan bahwa mahasiswa penerima manfaat memiliki akses yang memadai terhadap layanan akademik dan non-akademik. Literatur menyebutkan bahwa keberhasilan program pendidikan afirmatif sangat ditentukan oleh derajat kolaborasi lintas institusi (Altbach et al., 2019), dan dalam konteks Satu Rumah Satu Sarjana, kolaborasi tersebut tampak mulai terbangun meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Dibandingkan dengan kebijakan afirmatif nasional, seperti KIP Kuliah, kebijakan Satu Rumah Satu Sarjana memiliki keunikan karena diutamakan menyasar rumah tangga yang belum memiliki lulusan sarjana. Pendekatan ini memperluas cakupan afirmasi bukan hanya untuk mahasiswa sebagai individu, melainkan juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam keluarga. Kebijakan semacam ini jarang diterapkan dalam skala provinsi di Indonesia, sehingga menjadi salah satu aspek kebaruan penelitian ini. Dengan demikian, temuan awal mengenai perumusan kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan inovasi kebijakan yang memiliki potensi menjadi model bagi daerah lain.

Efektivitas Implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana di Lapangan

Implementasi Satu Rumah Satu Sarjana memperlihatkan efektivitas awal yang cukup signifikan terutama pada aspek pendataan, verifikasi ekonomi, dan penyaluran bantuan pendidikan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan kelurahan, kecamatan, hingga tingkat provinsi. Mekanisme ini mampu mengurangi ketidaktepatan sasaran meskipun belum sepenuhnya eliminatif. Dari wawancara dengan pejabat teknis, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi cukup tinggi, menunjukkan adanya penerimaan publik terhadap tujuan program.

Meskipun demikian, program masih menghadapi berbagai kendala untuk implementasi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat teknis dan variasi komitmen antar kabupaten/kota. Sebagian daerah melaporkan bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam menyediakan data sosial ekonomi yang mutakhir, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas administratif (*administrative capacity*) dan kemampuan koordinasi antarlembaga (Hill & Hupe, 2014). Oleh karena itu, variabilitas kapasitas antarwilayah menjadi faktor penentu efektivitas program.

Efektivitas program juga dapat dilihat dari dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi calon mahasiswa penerima beasiswa dari kelompok keluarga berpenghasilan rendah. Hasil wawancara dengan calon mahasiswa penerima manfaat menunjukkan bahwa program Satu Rumah Satu Sarjana berhasil membuka akses pendidikan yang sebelumnya terhambat karena keterbatasan biaya. Beberapa calon mahasiswa juga melaporkan adanya

peningkatan motivasi dan respons positif dari keluarga mereka terhadap pendidikan tinggi. Untuk tahap awal implementasi, indikator-indikator ini menunjukkan bahwa Satu Rumah Satu Sarjana memiliki prospek yang baik, meskipun evaluasi jangka panjang masih diperlukan untuk menilai dampak strukturalnya.

Dampak Program terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah potensi Satu Rumah Satu Sarjana dalam menciptakan *first-generation graduates* di banyak rumah tangga penerima manfaat. Kehadiran individu pertama yang menempuh pendidikan tinggi dalam keluarga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Wawancara menunjukkan bahwa calon mahasiswa dari keluarga tanpa riwayat pendidikan tinggi menghadapi tantangan adaptasi akademik, tetapi menunjukkan motivasi yang tinggi untuk melanjutkan studi pada pendidikan tinggi. Literatur mengenai mobilitas sosial menekankan bahwa keberhasilan individu dalam mencapai pendidikan tinggi dapat menciptakan efek pengganda dalam keluarga, seperti peningkatan aspirasi pendidikan adik-adik dan perubahan orientasi kerja rumah tangga (Breen & Jonsson, 2007).

Selain aspek motivasi, program ini juga mempengaruhi perubahan pola pikir keluarga terhadap pentingnya pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial. Keluarga calon penerima manfaat mengemukakan kesadaran bahwa pendidikan tinggi dapat memperluas peluang ekonomi dan sosial. Perubahan ini selaras dengan konsep *human capital formation* yang menyatakan bahwa investasi pendidikan pada satu anggota keluarga dapat meningkatkan nilai ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa Satu Rumah Satu Sarjana bukan sekadar program bantuan biaya pendidikan, tetapi juga intervensi sosial yang memperkuat kapasitas keluarga dalam menciptakan perubahan jangka panjang.

Namun demikian, dampak program terhadap peningkatan pendapatan atau kemampuan ekonomi keluarga masih belum dapat diukur secara akurat karena sebagian besar calon mahasiswa masih berada pada jenjang pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang program, termasuk sampai pada peningkatan pendapatan lulusan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Meskipun demikian, indikator-indikator awal menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.

Tantangan Struktural dan Institusional dalam Pelaksanaan Program

Dalam tahap perencanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana, penelitian ini menemukan bahwa tantangan struktural dan institusional mulai tampak meskipun program belum memasuki fase implementasi dan baru akan dijalankan pada tahun 2026. Salah satu isu utama adalah potensi keterbatasan anggaran yang berpotensi memengaruhi besaran kuota awal. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan optimisme tinggi bahwa kapasitas fiskal dan dukungan politik yang kuat akan memungkinkan program ini dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Hal ini selaras dengan pandangan Howlett (2019) bahwa kesiapan fiskal merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan afirmatif skala daerah, terutama pada fase perencanaan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi telah mulai merancang skema pembiayaan multi-sumber, termasuk opsi kemitraan dengan perguruan tinggi dan potensi kontribusi sektor swasta.

Selain aspek fiskal, tantangan lain muncul dari kebutuhan akan data sosial ekonomi yang akurat untuk memastikan ketepatan sasaran sejak awal program dijalankan. Mengacu pada literatur kebijakan publik, kualitas basis data merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas program sosial (Peters, 2015). Saat ini, pemutakhiran data rumah tangga sasaran masih terus dilakukan melalui integrasi berbagai sumber data seperti DTKS, data kabupaten/kota, serta pendataan mandiri oleh perangkat daerah. Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah optimistis bahwa dengan penyempurnaan sistem data sebelum 2026, mekanisme seleksi penerima manfaat dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran sebagaimana sering ditemukan pada program afirmatif lainnya.

Tantangan ketiga terkait perencanaan adalah belum adanya standardisasi komponen biaya pendidikan lintas perguruan tinggi, termasuk variasi UKT dan kebutuhan biaya hidup mahasiswa. Walaupun program belum berjalan, isu ini sudah diantisipasi pemerintah melalui peninjauan kesepakatan bersama dengan perguruan tinggi mitra sebelum implementasi dimulai. Selain itu, ketiadaan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu menjadi agenda penting yang sedang disiapkan. Pemerintah provinsi telah merancang pengembangan *dashboard* monitoring berbasis data real-time untuk memastikan program berjalan berbasis bukti (*evidence-based*), sebagaimana direkomendasikan oleh Bovens, Goodin, & Schillemans (2014) terkait akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik. Persiapan sistem evaluasi sejak fase awal ini menunjukkan optimisme sekaligus komitmen pemerintah untuk menjadikan SRSS sebagai program unggulan yang berkelanjutan dan dapat direplikasi.

Implikasi Temuan bagi Penguatan Kebijakan Publik Pembangunan SDM di Daerah

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai kebijakan afirmatif pendidikan daerah. Temuan menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam memperluas akses pendidikan tinggi sangat esensial, terutama ketika pemerintah daerah mampu merancang kebijakan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Satu Rumah Satu Sarjana menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak harus bersifat nasional; daerah mampu mengembangkan inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi sosio-ekonomi wilayahnya. Kontribusi teoretis ini memperkaya diskursus *decentralized education governance*.

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa program Satu Rumah Satu Sarjana dapat menjadi model kebijakan yang mampu memperkuat *intergenerational human capital formation*. Karena program ini menyasar keluarga tanpa lulusan sarjana, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada struktur sosial keluarga. Intervensi semacam ini merupakan strategi yang efektif untuk mempercepat penurunan kemiskinan struktural, karena pendidikan tinggi terbukti memiliki korelasi kuat dengan peningkatan pendapatan dan mobilitas sosial. Hal ini menjadikan Satu Rumah Satu Sarjana relevan sebagai strategi pembangunan jangka panjang bagi daerah.

Selain itu, temuan penelitian mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah, terutama pada aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tanpa peningkatan kapasitas, program seperti Satu Rumah Satu Sarjana berisiko kehilangan efektivitasnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah memperkuat integrasi data sosial, mengembangkan skema pembiayaan komplementer, dan menciptakan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja.

Keselarasan dan Divergensi dengan Temuan Studi Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki keselarasan dengan sejumlah studi terdahulu yang menunjukkan bahwa dukungan finansial dari pemerintah daerah mampu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di kalangan keluarga berpenghasilan rendah (Rahman, 2021; Oketch, 2016). Temuan ini memperkuat argumen bahwa hambatan ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi di negara berkembang, sehingga intervensi biaya memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akses. Keselarasan ini menunjukkan bahwa SRSS berada pada jalur kebijakan yang tepat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan divergensi penting terkait pendekatan *household-level targeting*. Sebagian besar program beasiswa di Indonesia dan negara berkembang menggunakan pendekatan berbasis individu, yang berarti bahwa

kebijakan fokus pada mahasiswa sebagai penerima manfaat. Pendekatan Satu Rumah Satu Sarjana, sebaliknya, menyasar keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana sebagai unit sasaran kebijakan. Divergensi ini menjadi temuan kebaruan (*novelty*) yang penting karena menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk memperkuat struktur sosial keluarga, bukan hanya mendanai pendidikan individu.

Divergensi lain juga terlihat pada aspek kemitraan kelembagaan. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program afirmatif biasanya bergantung pada kapasitas perguruan tinggi (Hickey & King, 2016), sedangkan penelitian ini menemukan bahwa variasi komitmen pemerintah kabupaten/kota juga sangat berpengaruh. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor implementasi kebijakan pendidikan berbasis daerah dalam konteks Indonesia.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diposisikan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan Program Satu Rumah Satu Sarjana sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis keluarga. Pada tahap perencanaan, pemerintah telah menyusun kerangka kebijakan, menentukan sasaran rumah tangga prioritas, serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi untuk memastikan kesiapan ekosistem pendidikan ketika program mulai dijalankan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun program belum diimplementasikan, arah kebijakan dan desain awal SRSS telah menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Namun, sejumlah tantangan diperkirakan muncul, antara lain kebutuhan penguatan kapasitas administrasi, perlunya integrasi data sosial ekonomi yang lebih akurat, serta variasi kesiapan antarwilayah yang harus diantisipasi sejak fase awal kebijakan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting melalui pemetaan mekanisme kebijakan afirmatif berbasis rumah tangga dalam konteks pemerintah daerah, yang masih jarang dibahas dalam literatur pendidikan Indonesia. Integrasi perspektif *Human Capital Theory*, *Capability Approach*, dan teori implementasi kebijakan menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami potensi dan prasyarat keberhasilan program sebelum diterapkan. Meskipun begitu, studi ini memiliki keterbatasan, terutama karena belum tersedianya data empiris jangka panjang akibat Satu Rumah Satu Sarjana yang belum berjalan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan desain *mixed-methods* dan analisis longitudinal ketika program telah berlangsung, sementara secara praktis pemerintah perlu memperkuat standardisasi biaya pendidikan, koordinasi lintas instansi, dan pengembangan sistem monitoring terpadu agar Satu Rumah Satu Sarjana dapat menjadi model kebijakan afirmatif yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pembangunan SDM Kalimantan Tengah.

REFERENSI

- Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). *Trends in global higher education: Tracking an academic revolution*. UNESCO Publishing.
- Antara News. (2025, 16 Juli). *Satu Rumah Satu Sarjana: antarkan asa mengenyam pendidikan tinggi*. Antara News.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Statistik Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2023*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2024*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. National Bureau of Economic Research.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Becker, G. S. (1964). Investment in human capital: A theoretical analysis. *The Journal of Political Economy*, 70, 9–49.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Breen, R., & Jonsson, J. O. (2007). Explaining change in social fluidity: Educational equalization and educational expansion in twentieth-century Sweden. *American Journal of Sociology*, 112(6), 1775–1810. <https://doi.org/10.1086/508790>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hickey, S., & King, S. (2016). Understanding social accountability: Politics, power and building new social contracts. *Journal of Development Studies*, 52(8), 1225–1240. <https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1134778>
- Hill, M., & Hupe, P. (2009). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Howlett, M. (2019). *Designing public policies: Principles and instruments*. Routledge.
- Media Indonesia. (2025, 1 Desember). *Program Satu Rumah Satu Sarjana: 34 kampus di Kalteng tandatangani kerja sama dukung kuliah gratis*. Media Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Oketch, M. (2016). Financing higher education in sub-Saharan Africa: Some reflections and implications for sustainable development. *Higher Education*, 72(4), 525–539. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0044-6>
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.

- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.
- Rahman, A. (2021). Financial aid and higher education access among low-income families in developing countries: A systematic review. *International Journal of Educational Development*, 86, 102457. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102457>
- Ramadhanty, A. W. (2023). *Efektivitas Program Dua Sarjana Satu Desa bagi mahasiswa tidak mampu di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro* (skripsi/tesis). Institutional Repository, Eprints IPDN.
- Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Publikasi Program Satu Rumah Satu Sarjana* (siaran pers dan MoU).
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujud, A., & Ivan, M. (2022). Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 49–56.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023/2024*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022*. UNESCO Publishing.
- World Bank. (2023). *Indonesia human capital review: Investing in people*. World Bank Group.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Zizahh, A. (2025). Pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Untan*.
- [Jurnal tinjauan beasiswa di Indonesia]. (2025). *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Citra Bakti Journal.